

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara demokrasi, bisa dilihat dari pelaksanaan sistem pemilihan umumnya masyarakat dilibatkan dalam proses demokrasi itu sendiri. Pada dasarnya sistem demokrasi di Indonesia bertujuan sebagai penampung aspirasi rakyat sehingga terciptanya suatu mekanisme dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Agar terciptanya sebuah sistem yang demokrasi diperlukannya sistem pemilihan umum (Pemilu) yang bebas dan rahasia sehingga bentuk kebebasan yang merupakan ciri dari negara demokrasi terwujud. (Rusandi, 2007)

Pemilu merupakan sesuatu yang sangat penting dikarenakan pemilu merupakan indikator sebuah negara menjalankan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan dengan memilih kandidat legislatif maupun eksekutif dimulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional sehingga aspirasi rakyat bisa tertampung. Di Indonesia sendiri pemilu diadakan dengan rentang waktu 5 tahun sekali, namun sebelumnya penyelenggaraan pemilu tidak teratur seperti sekarang (Surbakti, 1999).

Sejarah pemilu di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama pada tahun 1955. Sudah 13 kali dilaksanakannya pemilu yaitu tahun: 1955 yang merupakan era Orde Lama, lalu pada era Orde Baru 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan di era Reformasi 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pada pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan pada pemilu

1971 diikuti oleh 91 kandidat yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan, pemilu 1997 diikuti oleh 3 partai politik, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai politik, pemilu 2014 diikuti oleh 10 partai politik, pemilu ditahun 2019 diikuti oleh 16 partai politik dan pemilu ditahun 2024 diikuti oleh 18 partai politik.

Menurut (Budiarjo, 2019) partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan ia baru ada di negara modern.

Menurut (Rahwarin, 2022) partai politik lahir karena berbagai pertentangan sosial yang terjadi pada abad ke 16-17. Salah satu pertentangan sosial yang melahirkan partai-partai berbasis keagamaan adalah pertentangan negara dan gereja. Apabila sejarah partai politik di Indonesia lahir sebagai bentuk melawan imperialisme dan gejolak sosial. Partai politik ini bergerak dengan spektrum dan ideologi yang berbeda. Pergolakan politik yang dimaksud adalah partai yang berideologi nasionalis, sosialis, dan juga Islam. Ideologi sosialisme dan nasionalisme merepresentasikan kelompok nasionalis dan juga ideologi Islam merepresentasikan kelompok Islam.

Menurut Qodir dalam (Argenti dan Rifai, 2014-2015) berbicara mengenai relasi kelompok Islam dengan politik memiliki posisi yang sangat strategis,

mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dari total penduduknya 237 juta jiwa sebesar 86,7% mayoritas beragama Islam. Maka secara politik dan sosiologis fakta tersebut sangat penting untuk diperhatikan.

Pada masa Orde Lama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama) menjadi dua partai terdepan yang memperjuangkan syariat islam dengan menghendaki dasar negara berlandaskan Islam bukan pancasila karena pancasila itu bersifat relatif, baik dari sila-sila itu sendiri maupun hubungan antara satu dengan yang lainnya, bertolak belakang dengan Islam yang mempunyai hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui wahyu. Namun hal ini menimbulkan pertarungan antara kelompok Islam dan nasionalis serta tidak menemui titik temu, kedua belah pihak mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional (Argenti dan Rifai, 2014-2015).

Pada masa Orde Baru kelompok politik Islam mengalami marginalisasi peran politik, dan mengalami represifitas kekerasan oleh negara. Hal ini dimulai dari ditolaknya rehabilitasi partai Masyumi lalu kecurigaan yang tinggi pada umat Islam. Pada masa ini negara menjadikan umat Islam sebagai sasaran kekerasan, peristiwa pertama adalah tragedi berdarah Tanjung Priok, lalu diikuti kasus pelarangan jilbab, dan peristiwa berdarah 6 Februari 1989 antara komunitas Cihideung yang merupakan jamaah Warsidi dengan pihak koramil Way Jepara (Argenti dan Rifai, 2014-2015).

Pada masa reformasi mengalami perubahan sehingga banyak berdirinya partai politik, sehingga menjadikan panggung politik Indonesia semakin dinamis, relasi Islam dengan negara semakin menarik karena kebebasan politik pada era reformasi. Pada waktu ini diberikan peluang yang seluas-luasnya, kembalinya aspirasi Islam politik dalam menerapkan Islam sebagai dasar negara. Dari sinilah kelompok Islam kembali eksis, karena pada era sebelumnya kelompok Islam termarginalkan. Reformasi memberikan kesempatan seluas-luasnya pada setiap ideologi politik dan keyakinan untuk mengisi ruang-ruang publik sehingga banyak partai politik yang berdiri di era ini (Argenti dan Rifai, 2014-2015).

Apabila Orde Lama identik dengan presiden pertama yaitu Soekarno, Orde Baru identik dengan presiden kedua yaitu Soeharto, maka era reformasi identik dengan tokoh M. Amien Rais. Amien Rais merupakan tokoh yang sentral dalam gerakan reformasi yang banyak didukung oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Gerakan reformasi hadir sebagai bentuk perlawanan atas hegemoni kekuasaan Soeharto, karena pada masa Soeharto korupsi, kolusi, nepotisme merajalela (KKN) dan banyaknya pelanggaran HAM terjadi pada masa ini terutama terhadap Umat Islam (Rahwarin, 2022).

Pasca reformasi partai politik sangat banyak bermunculan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun muncul sebanyak 140 partai politik, dari jumlah tersebut partai Islam sebanyak 32 partai. Karena hal tersebut para tokoh hanya ingin mendirikan satu partai saja sebagai partai yang mewadahi umat Islam seperti Masyumi pada tahun 1945, namun dalam berbagai pertemuan para tokoh akhirnya muncul dua pilihan yaitu memperkuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau

mendirikan partai baru karena mengingat PPP merupakan warisan dari Orde Baru, namun kongres tersebut tidak menghasilkan seperti gagasan semula yang hanya mendirikan satu partai saja (Rahwarin, 2022).

Karena pada kongres tersebut tidak menghasilkan seperti gagasan yang diinginkan maka diadakan lagi kongres yang diwadahi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Badan Kordinasi Umat Islam (BKUI) yang menghasilkan wadah politik bernama PBB (Partai Bulan Bintang) namun terjadi perdebatan yang sengit antar kelompok sehingga muncul kelompok pertama yang tetap menggunakan PBB, Kelompok kedua ingin menamakan masyumi sehingga pada akhirnya muncul kelompok Masyumi versi Ridwan Saidi (Masyumi Baru) dan Masyumi versi Abdullah Hehamahua (PII Masyumi), kelompok ketiga yang dipimpin oleh Amien Rais yang tidak ingin menggunakan PBB, serta simbol dan asas Islam, dengan alasan “baju kesempitan” sehingga kelompok ini membentuk PAN (Partai Amanat Nasional), dan kelompok keempat yang terdiri dari anak-anak muda yang tidak puas dengan FUI dan BKUI sehingga mereka mendirikan partai sendiri yaitu PK (Partai Keadilan) yang merupakan cikal bakal dari PKS (Partai Keadilan sejahtera) (Rahwarin, 2022).

PK sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia karena hanya membutuhkan waktu satu tahun setelah ia didirikan pada 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 ia mengikuti pemilu 1999 dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan suara dan mendapatkan 7 perwakilan di DPR. Partai yang dideklarasikan oleh 52 gerakan Tarbiyah ini disebut sebagai “*The Rising Star*” (Rahmat, 2008).

Pada pemilu 2004, PK berganti nama menjadi PKS karena alasan gagal memenuhi *electoral threshold* sebesar 2,5% suara untuk memenuhi persyaratan mengikuti pemilu. Pasca berganti nama partai PKS meraih peningkatan suara yang sangat signifikan pada pemilu tahun 2004 dengan memperoleh suara sebanyak 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total suara dan menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 45 orang. Bahkan Hidayat Nur Wahid yang merupakan mantan presiden dari partai ini terpilih menjadi seorang ketua MPR. Meskipun kalah dibandingkan dengan partai-partai besar yang sudah ada lebih awal, namun partai ini dapat mengungguli partai-partai baru lain (Rahmat, 2008).

Pada pemilu berikutnya yaitu tahun 2009 PKS memperoleh 8,23 juta suara atau sekitar 7,89% dari total suara, lalu pada pemilu 2014 PKS memperoleh 8,46 juta suara atau sebanyak 6,77%. Pencapaian tertinggi PKS terjadi pada pemilu 2019 dengan perolehan 11,49 juta suara atau sekitar 8,21%. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 3,4 juta suara dari perolehan pemilu sebelumnya.

Keberhasilan PKS dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan perolehan suara karena strategi menjadi partai terbuka. Dalam konteks ini, PKS menggunakan ide-ide umum yang berlaku di masyarakat luas agar eksistensinya sebagai partai Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas meskipun secara tegas PKS tetap menganut Ideologi Islam. PKS merupakan bagian dari Islam moderat (pertengahan), mengingat mayoritas Muslim di Indonesia berpemahaman Islam yang moderat. Islam Moderat sendiri dipandang sebagai ajaran Islam yang lebih sesuai, lebih terbuka dan lebih bisa menerima fakta pluralitas di Indonesia (Syamsuadi dkk, 2020).

Keberhasilan PKS di level nasional tersebut juga kemudian tersebar ke dalam praktik politik di level daerah. Salah satu daerah yang menunjukkan kesuksesan adalah Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2014 yang awalnya PKS hanya memperoleh 4 kursi atau memperoleh sekitar 81.000 suara, PKS mengalami peningkatan suara yang sangat signifikan pada pemilu tahun 2019, pada pemilu tahun ini PKS cukup dominan dengan banyaknya kursi anggota legislatif yang diisi, PKS meraih kursi terbanyak di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1.1 Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat 2019

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	8 Kursi	13,24%
2.	Partai Gerindra	7 Kursi	13,23%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7 Kursi	14,76%
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	5 Kursi	9,1%
5.	Partai Golongan Karya	5 Kursi	10,31%
6.	Partai Nasional Demokrat	5 Kursi	6,41%
7.	Partai Amanat Nasional	5 Kursi	7,37%
8.	Partai Demokrat	5 Kursi	7,91%
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3 Kursi	5,78%
10.	Partai Persatuan Indonesia	1 Kursi	3,23%

Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa PKS memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 dengan meraih kursi terbanyak sebesar 8 kursi atau sekitar 13,24% dan memperoleh suara sebanyak 127.797 suara di Kabupaten Bandung Barat.

Pada tahun 2024 ini jumlah orang yang akan mengikuti pemilu di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.317.866 orang sebagai daftar pemilih tetap (DPT) dan 230 orang sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb). Dari jumlah pemilih tersebut PKS kembali mengalami peningkatan suara yang cukup signifikan di tahun 2024 ini, PKS dapat memperoleh 158.710 suara mengungguli Golkar dan Gerindra dan menjadi peraih suara terbanyak di Bandung Barat. Maka dari itu populasi dalam penelitian ini adalah 158.710 warga Kabupaten Bandung Barat yang telah memilih PKS dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Pemilih Purnawirawan TNI Angkatan Darat Di Komplek Mabab Kelurahan Rempoa. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Jianrestra (2023). Dalam penelitian ini dijelaskan perilaku pemilih yang berpengaruh terhadap pilihan pasangan presiden Joko Widodo/Ma'ruf Amin adalah perilaku sosiologis dan rasional sedangkan perilaku pemilih yang berpengaruh terhadap pilihan pasangan presiden Prabowo Subianto/Sandiaga Uno adalah perilaku psikologis dan rasional.

Kemudian Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Atalla Azzahra sukarno (2023) yang berjudul Perilaku Pemilih Dan Pilpres Studi Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Pemilihan Presiden 2019 Di Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Dalam penelitian ini dijelaskan

bahwa perilaku pemilih yang berpengaruh terhadap pilihan pasangan presiden Joko Widodo/Ma'ruf Amin adalah perilaku psikologis, rasional dan sosiologis. Sedangkan pada pilihan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno perilaku pemilih yang berpengaruh adalah psikologis dan sosiologis.

Peneliti terdahulu yang terakhir yang diteliti oleh Vinny Olifvia dan Suryanef (2023) berjudul Faktor-Faktor Penentu Kemenangan Nasrul Abit-Indra Catri Pada Pilkada Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa kemenangan pasangan Nasrul Abit-Indra Catri dipengaruhi oleh faktor kepribadian Nasrul Abit yang dinilai baik dan juga ia cukup populer karena sebelumnya Nasrul Abit pernah menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan. Kemudian selain faktor itu masyarakat memilih karena kesamaan geografis atau tempat tinggal dengan Nasrul Abit. Faktor lainnya masyarakat memilih karena faktor keluarga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perilaku pemilih psikologis berpengaruh terhadap Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat?
2. Apakah perilaku pemilih sosiologis berpengaruh terhadap Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat?
3. Apakah perilaku pemilih rasional berpengaruh terhadap Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh perilaku pemilih terhadap elektabilitas PKS di Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Sebagai rujukan partai-partai tentang pengaruh perilaku pemilih terhadap elektabilitas.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan Penulis, dengan diselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi banyak pihak.

Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1.4.1. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi di bidang keilmuan bidang politik terlebih khusus dalam hal perilaku pemilih PKS pada kontestasi politik.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Partai Keadilan Sejahtera tentang perilaku pemilih dan elektabilitas.

1.4.2. Secara Praktis

- 1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan gagasan untuk penulis
- 2) Memberikan manfaat bagi pembaca tentang perilaku pemilih dan elektabilitas partai
- 3) Menjadi referensi atau bahan acuan bagi para kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum, terkait perilaku pemilih dan elektabilitas.